

PENYALURAN BANTUAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL KOTA LHOKSEUMAWE

Nadia¹

nadia.200210160@mhs.unimal.ac.id¹

Lisa Iryani²

lisa.iryani@unimal.ac.id²

Murniati³

murniati@unimal.ac.id³

Syamsuddin⁴

syamsuddin@unimal.ac.id⁴

^{1,2,3,4}Universitas Malikussaleh

ABSTRACT

The considerations chosen for the research were motivated by the problem that there are still people with disabilities who have not received aid distribution through rehabilitation in Ulee Village Jalan Banda Sakti District and the imbalance between the number of disabilities and the amount of aid distributed so that there are still people with disabilities who have not been empowered. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques by carrying out several stages, namely observation, interviews and documentation. The data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation and conclusions. This research was studied using the theory of Sri Najiati, Agus Asmana and I Nyoman (2005: 54), there are four principles consisting of the principles of equality, participation, awareness or independence, and sustainability. The results of the research show that the program for distributing aid to people with disabilities in Banda Sakti District by The Lhokseumawe City Social Service has demonstrated success in implementing the principle of equality. This can be seen from efforts to provide assistance with tools tailored to each individual's needs and the existence of outreach programs to improve their quality of life. However, there are still several weaknesses in the application of other empowerment principles. The principle of participation has not been fully realized because the community has not been actively involved in the aid distribution process. The principle of awareness or independence also needs to be improved, considering the importance of providing skills to people with disabilities so that they can be more independent. Even though the principle of sustainability has been implemented, it should be remembered that program sustainability is not enough if it is not accompanied by improving the quality of the program itself. The obstacle in distributing aid by the Lhokseumawe City Social Service in Banda Sakti District is that there are no obstacles from the Lhokseumawe City Social Service, only a lack of understanding from the community and many people complain about unclear information

and complicated file management and indifferent service from employees. So people are lazy to take care of aid.

Keywords: *Distribution Of Aid, Persons With Disabilities, Lhokseumawe City Social Service.*

ABSTRAK

Pertimbangan dipilih penelitian dilatarbelakangi oleh permasalahan Masih terdapat penyandang disabilitas belum mendapatkan penyaluran bantuan melalui rehabilitasi di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti dan ketidakseimbangan antara jumlah disabilitas dan jumlah bantuan yang disalurkan sehingga masih ada disabilitas yang belum diberdayakan. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan beberapa tahap yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Penelitian ini dikaji menggunakan teori Sri Najiati, Agus Asmana dan I Nyoman(2005:54) terdapat empat prinsip yang terdiri dari prinsip kesetaraan, partisipasi, kewasdayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Penyaluran bantuan kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Banda Sakti oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip kesetaraan. Hal ini terlihat dari upaya memberikan bantuan alat bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan adanya program sosialisasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan prinsip pemberdayaan lainnya. Prinsip partisipasi belum sepenuhnya terwujud karena masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam proses penyaluran bantuan. Prinsip kewasdayaan atau kemandirian juga perlu ditingkatkan, mengingat pentingnya memberikan keterampilan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat lebih mandiri. Meskipun prinsip berkelanjutan telah diterapkan, perlu diingat bahwa keberlanjutan program tidak cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas program itu sendiri. Kendala dalam penyaluran bantuan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti yaitu Jika dari Dinas Sosial Kota Lhokseumawe tidak ada kendala apapun, Cuma kurangnya pemahaman dari masyarakat dan masyarakat banyak mengeluh atas ketidak jelasan informasi dan pengurusan berkas yang rumit dan pelayanan dari pegawai acuh tak cuh sehingga masyarakat malas untuk mengurus bantuan.

Kata Kunci: Penyaluran Bantuan, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Namun, dalam kenyataannya penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi dalam kehidupannya. Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial, budaya dan politik. Penyandang disabilitas juga seringkali mengalami kemiskinan, isolasi, dan marginalisasi.

Penyaluran bantuan kepada disabilitas adalah suatu proses penyediaan berbagai bentuk dukungan yang diberikan kepada individu dengan disabilitas. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, memfasilitasi kemandirian, serta memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Bentuk bantuan yang diberikan bisa sangat beragam mulai dari bantuan

finansial, alat bantu, aksesibilitas fisik, hingga dukungan sosial dan psikologis.

Menangani persoalan tersebut dalam menangani penyaluran bantuan kepada penyandang disabilitas maka Menurut Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menjelaskan Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial yaitu pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial seperti melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang sosial serta melaksanakan tugas-tugas.

Selanjutnya berdasarkan observasi awal dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Beliau mengatakan program dari Dinas Sosial Kota Lhokseumawe hanya memberikan penggadaan alat bantu seperti tongkat, motor modifikasi dan lain-lainnya dan penggadaan makanan bagi disabilitas. Sedangkan program seperti pelatihan keterampilan tidak dilakukan di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe tetapi langsung dilakukan di Dinas provinsi aceh. (Sumber: Wawancara dengan Kabid Dinsos Lhokseumawe, 20/11/ 20123)

Jumlah penyandang Disabilitas Di Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebanyak 192 orang yang tersebar di empat Kecamatan . Data penyaluran di atas menunjukkan bahwa disabilitas yang menerima bantuan alat bantu pada tahun 2023 ada 72 penerima. Sebanyak 10 orang menerima alat bantu honda modifikasi dan 62 orang menerima alat bantu kursi roda. Dari perbandingan data jumlah disabilitas di Kota Lhokseumawe tahun 2023 dan data penyaluran alat bantu tahun 2023, terlihat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe adalah 192 orang, sedangkan alat bantu yang disalurkan hanya 72 orang .

Hal yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini, adalah ketidakseimbangan antara jumlah disabilitas dan jumlah bantuan yang disalurkan, kurang lebih dari 120 masyarakat disabilitas tidak diberdayakan, penyaluran bantuan tersebut tidak tersampaikan kepada masyarakat tersebut, serta masih adanya disabilitas yang memerlukan perhatian dari pemerintah Kota Lhokseumawe yang berada di Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

TINAJUAN PUSTAKA Administrasi Publik

Administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerjasehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional.Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat

terwujud bila ada perencanaan yang realistik dan benar-benar tepat, logis dan dapatdikerjakan. (Harbani Pasalong, 2007:4).

Menurut Sondang P. Siagian (2020:3) Administrasi adalah keseluruhanproses pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yangterlibat dalam suatu bentuk kerja sama demi terciptanya tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan lainnya. Bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 pasal 2 penyaluran bantuan non tunai adalah bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial seperti penyandang disabilitas dan lainnya, dan pelayanan sosial . Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial.

Pemerintah melakukan penyaluran bantuan non tunai ini yang bertujuan salah untuk meningkatkan kesejahteraan atau memberdayakan

masyarakat yang rentan terhadap resiko sosial salah satunya pemerintah memberikan penyaluran bantuan terhadap penyandang disabilitas. Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran bantuan non tunai, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sri Najiati, Agus Asmana dan I Nyoman (2005:54) empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan kemandirian yaitu:

Prinsip kesetaraan yaitu Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat, baik laki- laki maupun perempuan seperti hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.

Partisipasi yaitu program pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang

berkomitmen tinggi terhadap masyarakat .

Keswadayaan atau kemandirian yaitu prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.

Berkelanjutan yaitu program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri.Namun secara perlahan peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Penyandang Disabilitas

Menurut Chodzirin(2013:17) Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap. Yang dikenal masyarakat mengenai disabilitas atau difabel adalah seseorang penyandang cacat. Hal ini yang secara langsung menafsirkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya.

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwasanya penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan

dengan warga negaralainnya berdasarkan kesamaan hak.

Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Menurut Nur Kholis Refani (2013:17) Adapun jenis - jenis penyandang disabilitas, diantaranya:

- Disabilitas fisik yaitu kelainan pada tubuh, kelainan pada pendengaran, kelainan pada pendengaran, kelainan bicara
- Disabilitas Mental yaitu Mental tinggi, mental rendah, disabilitas ganda

Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terkait hak - hak penyandang disabilitas, diantaranya :

- Hak hidup
- Hak bebas
- Hak privasi
- Hak keadilan
- Hak pendidikan
- Hak pekerjaan
- Hak atas Kesehatan dll

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Jenis penelitian yang digunakan enelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Faisal (010:20) Penelitian deskriptif adalah menggambarkan dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan 3ocial dengan jalan mendeskripsikan

secara terperinci yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moelong 2016:4) pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di kecamatan banda sakti kota lhokseumawe dengan alasan masih terdapat penyandang disabilitas yang belum mendapatkan penyaluran bantuan melalui rehabilitasi yang terdapat di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengenai penyaluran bantuan kepada disabilitas di Kecamatan Banda Sakti yang dikaji melalui prinsip-prinsip pemberdayaan menurut Sri Najiati, Agus Asmana dan I Nyoman (2005:54) yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kewasdayaan atau kemandirian dan berkelanjutan

Prinsip Kesetaraan

Terkait dengan prinsip kesetaraan bahwa Dinas Sosial Kota Lhokseumawe sudah menerapkan prinsip kesetaraan dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat disabilitas baik laki-laki maupun perempuan yaitu diberikan bantuan alat bantu bagi disabilitas cacat produktif dan diberikan sosialisasi seperti bimbingan fisik mental yaitu dalam bentuk keagamaan dan lainnya.

Adapun juga pernah dilakukan pendataan bagi anak disabilitas untuk pelatihan keterampilan yang akan dilakukan di Dinas Aceh. Namun berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan masih ada masyarakat yang belum tersalurkan bantuan, alat bantu seperti yang terjadi pada anak disabilitas cacat ganda di Desa Hagu Teungoh yang tidak mendapatkan bantuan kursi roda, padahal nama anak tersebut sudah terdata dalam daftar nama-nama masyarakat penerima bantuan pada tahun 2023 di Kecamatan Banda Sakti. Tetapi dari data jumlah penerima bantuan sebanyak 14 penerima hanya 1 orang saja yang tidak mendapatkan bantuan, hal ini bisa dikatakan Dinas Sosial Kota Lhokseumawe sudah menerapkan prinsip kesetaraan dalam hal penyaluran bantuan.

Prinsip Partisipasi

Dinas sosial Kota Lhokseumawe belum melakukan penyaluran bantuan masyarakat disabilitas dengan menerapkan prinsip partisipasi.

yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat Dinas sosial Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya memberikan kesempatan, kewenangan kepada masyarakat untuk menentukan nasib masyarakat sendiri melalui program penyaluran bantuan. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe hanya memberikan kesempatan kepada semua kalangan disabilitas untuk mengajukan proposal apa yang mereka butuhkan

untuk terbantunya kehidupan disabilitas tersebut.

erencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi terhadap program dalam penyaluran bantuan kepada disabilitas yang dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, dimana Dinas Sosial Kota Lhokseumawe membentuk tim koordinasi untuk pendataan masyarakat disabilitas perkecamatan di Kota Lhokseumawe, dilaksanakan dan diawasi oleh pihak pendamping perkecamatan dan juga mereka mengevaluasi setiap bantuan yang sudah diberikan dengan mendatangi pihak penerima bantuan dan melakukan monitoring terhadap masyarakat tersebut.

Kewasdayaan atau kemandirian

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe belum menerapkan prinsip kewasdayaan atau kemandirian. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Sosial Kota Lhokseumawe menghargai dan mengedepankan bantuan pihak lain yaitu hanya melakukan Pembinaan maupun sosialisasi, penyaluran alat bantu dan bantuan permakanan, sedangkan dalam hal keterampilan pelatihan tidak ada program di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe melainkan di Dinas sosial Aceh.

Namun Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pernah melakukan pendataan terhadap anak disabilitas untuk dilakukan pelatihan ketrampilan di Dinas Sosial Aceh , Cuma dalam 2 tahun terakhir ini juga sudah tidak ada lagi sehingga masyarakat disabilitas tersebut hanya terbantu. sehingga belum dikatakan mandiri.

Berkelanjutan

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe sudah menerapkan prinsip berkelanjutan dalam proses program penyaluran bantuan kepada disabilitas yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe yaitu penyaluran bantuan untuk disabilitas dilakukan berkelanjutan , program tersebut memang ada setiap tahunnya.

Pendamping masyarakat seperti tenaga kerja kemasyarakatan tidak bisa di hapuskan karena peran mereka sangat penting dalam proses penyaluran bantuan seperti dalam hal pendataan masyarakat, dan terkadang ada keluhan dari masyarakat yaitu mereka membutuhkan apa atau sebagainya, maka bisa disampaikan melalui pendamping ini dan saat penyaluran pun melibatkan pendamping tersebut.

Kendala penyaluran bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti

Dari beberapa hasil wawancara bersama masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Lhokseumawe tidak ada kejelasan informasi tentang penyaluran bantuan yaitu seperti dengan salah satu masyarakat di Desa Kutablang yang sebelumnya mendapatkan informasi sebagai penerima bantuan tetapi setelah mengunjungi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe langsung informasi dan data diri permohonan tidak ditemukan dan , masyarakat mengeluh tentang rumit proses pengurusan dan memakan waktu yang lama dan sikap acuh tak acuh dari pegawainya. Penyaluran bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe kendalanya itu, dari masyarakat banyak mengeluh, ketidak jelasan informasi dan pengurusan yang rumit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan bahwasannya

1. Penyaluran bantuan kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Banda Sakti oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe telah menunjukan keberhasilan dalam menerapkan prinsip kesetaraan. Hal ini terlihat dari upaya memberikan bantuan alat bantu yang disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing individu dan adanya program sosialisasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan prinsip pemberdayaan lainnya.

Prinsip partisipasi belum sepenuhnya terwujud karena masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam proses penyaluran bantuan. Prinsip kewasdayaan atau kemandirian juga perlu ditingkatkan, mengingat pentingnya memberikan keterampilan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat lebih mandiri. Meskipun prinsip berkelanjutan telah diterapkan, perlu diingat bahwa keberlanjutan program tidak cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas program itu sendiri.

2. Kendala dalam penyaluran bantuan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti yaitu Jika dari Dinas Sosial Kota Lhokseumawe tidak ada kendala apapun, Cuma kurangnya pemahaman dari masyarakat dan masyarakat banyak mengeluh atas ketidak jelasan informasi dan pengurusan berkas yang rumit dan pelayanan dari pegawai acuh tak cuh sehingga masyarakat malas untuk mengurus bantuan .

Saran

1. Untuk Dinas Sosial Kota Lhokseumawe melakukan peningkatan keterlibatan dan kualitas pelayanan seperti membentuk forum diskusi, menyusun prosedur yang jelas, melatih petugas, dan melakukan evaluasi, secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, meningkatkan keterbukaan informasi melalui website, media sosial, dan laporan kinerja untuk membangun kepercayaan masyarakat, juga berfokus mengembangkan program seperti pada pelatihan keterampilan yang relevan, membangun kemitraan dengan dunia usaha, dan memberikan pendampingan usaha untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.
2. Untuk masyarakat, khususnya penyandang disabilitas seperti turut aktif berpartisipasi yaitu mengikuti forum diskusi, memberikan masukan, dan memperkuat organisasi penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak mereka, juga meningkatkan literasi seperti meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak dan program bantuan yang tersedia, serta cara mengaksesnya

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Sanapiah. 2010. Format- format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo
Persada
Sri najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. suryadiputra, Pemberdayaan

Masyarakat
di Lahan Gambut, (bogor: Wettlandb internasional- IP, 2005)
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 63 Tahun 2017